

# KETERKAITAN ANTARA RUMAH TANGGA PENERIMA MANFAAT BLT DAN TINGKAT KONSUMSI PANGAN: TEMUAN DARI INDONESIA

## *The Associations between UCT Beneficiary Households and Food Consumption Level: Findings from Indonesia*

Nadya Ahda

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

email: hdnadya@gmail.com

---

### **Abstract**

*The role of adequate nutrition to health and economic development, in general, has been recognized as very important and has been widely discussed in the previous literature. At the same time, research on the impact of the Unconditional Cash Transfer (UCT) program in Indonesia has also been frequently conducted. This study aims to evaluate the effect of UCT program acceptance status on household food consumption in Indonesia. The data used in this study is from the Indonesia Family Life Survey (IFLS), which allows this study to control various household socioeconomic characteristics that also influence household food consumption. The food consumption itself is proxied by the quantity of rice, chicken, and beef purchased during the last month. The estimation results show that rice consumption level differs significantly between beneficiary households and non-beneficiary households. Meanwhile, the difference is not statistically visible for chicken and beef consumption. This study then contributes to the existing literature implying UCT has a positive impact on the beneficiary household welfare in the short term.*

**Keywords: Unconditional Cash Transfer, Food Consumption, Nutrition Intake, Social Assistance, Household Welfare**

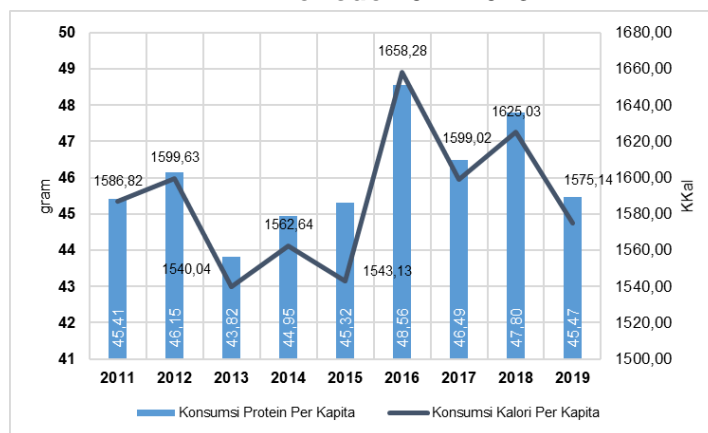
---

### **1. Pendahuluan**

Kecukupan nutrisi merupakan salah satu indikator pengukuran kesehatan yang sekaligus menjadi cerminan bagaimana kondisi sosioekonomi dari suatu perekonomian. Tidak hanya itu, kecukupan nutrisi juga dipercaya menjadi salah satu prasyarat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (FAO, 2004). Pada tahun 2020, Indonesia mencetak skor 19,1 pada *Global Hunger Index* (GHI), yang mana skor ini masuk pada kategori tingkat kelaparan moderat setelah selama beberapa periode terakhir terus mencetak skor >20,0. Skor >20,0 menunjukkan bahwa sebelum tahun 2020, Indonesia masih berada pada tingkat kelaparan

serius. Meskipun trennya membaik, namun apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, skor GHI Indonesia berada pada peringkat 70 dari 107 negara. Tidak hanya itu, skor 19,1 sebenarnya relatif berada hanya sedikit di bawah garis batas level kelaparan serius dan masih jauh dari jangkauan skor untuk tingkat kelaparan rendah (skor  $\leq 9,9$ ), sehingga hal ini menyisakan pekerjaan rumah lebih lanjut bagi pemerintah Indonesia untuk mengentaskan angka kelaparan. Data ini juga berbanding lurus dengan angka prevalensi kurang gizi (*prevalence of undernourishment*) Indonesia yang pada tahun 2020 justru naik menjadi 8,34 persen, dari pencapaiannya pada tahun 2019 yang sebesar 7,63 persen (BPS, 2020).

**Gambar 1. Rata-rata Harian Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Periode 2011-2019**

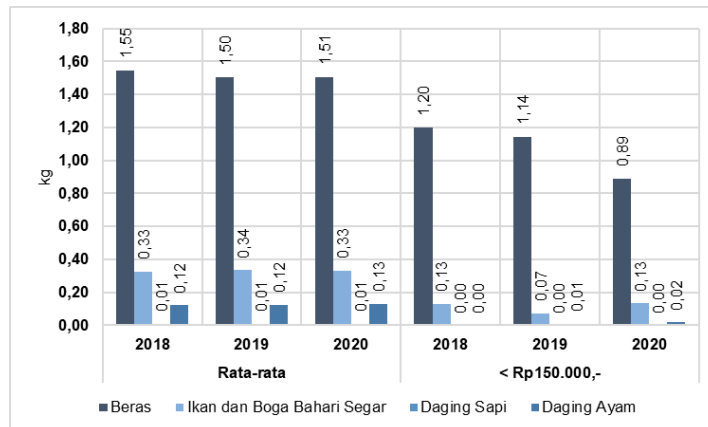


Sumber: BPS, 2020 (diolah)

Apabila dilihat secara detail, selama 1 dekade terakhir, konsumsi kalori dan protein per kapita harian masyarakat Indonesia relatif berfluktuatif (Gambar 1). Meskipun demikian, tren penurunan setidaknya terlihat di separuh dekade. Kemudian apabila dilihat dari rata-ratanya selama 1 dekade terakhir, masyarakat Indonesia terhitung hanya mengonsumsi sekitar 1588 kalori dan 46 gram protein per hari, yang mana hal ini masih jauh di bawah target pemerintah untuk tahun 2021-2024<sup>1</sup>. Apabila melihat spesifik pada masyarakat kelompok pengeluaran 20 persen terbawah (kuintil 1) atau kelompok termiskin, masih cukup besar proporsi masyarakat yang asupan kalorinya masih di bawah 1400 kkal/kapita/hari, yaitu mencapai 23,34 persen (BPS, 2019).

<sup>1</sup> Meskipun kebutuhan kalori dan protein setiap individu berbeda, namun pemerintah telah menargetkan Angka Kecukupan Energi/AKE sebesar 2.100 kkal/hari dan Angka Kecukupan Protein/AKP sebesar 57 gram/kapita/hari di tahun 2021-2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

**Gambar 2. Konsumsi Per Kapita Seminggu Menurut Jenis Pangan dan Pengeluaran Per Kapita Seminggu Periode 2018-2020**



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Apabila dilihat per jenis pangan, selama 3 tahun terakhir, konsumsi per kapita rata-rata masyarakat Indonesia menunjukkan tren yang berbeda-beda untuk setiap jenis pangan (Gambar 2)<sup>2</sup>. Beberapa poin penting yang dapat diambil dari grafik di atas antara lain, senada dengan data sebelumnya bahwa secara umum konsumsi per kapita bagi masyarakat dengan pengeluaran per kapita di bawah Rp150.000/minggu lebih rendah daripada konsumsi per kapita rata-rata masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, menurut data di atas, konsumsi beras dari masyarakat dengan pengeluaran per kapita terendah ini juga mengalami tren penurunan selama 3 tahun terakhir. Kelompok masyarakat ini pun juga relatif tidak mengonsumsi daging sapi sebagai asupan protein, dan besar kemungkinan hal ini disebabkan oleh faktor harga daging sapi yang lebih mahal daripada sumber protein lainnya, serta masih adanya substitusi sumber protein lain yang lebih terjangkau, misalnya olahan kedelai.

Di sisi lain, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia pertama kali diluncurkan pemerintah pada akhir tahun 2005 sebagai kompensasi atas pengurangan subsidi BBM, sekaligus menyelamatkan penurunan daya beli kelompok masyarakat miskin akibat pengurangan subsidi BBM tersebut. Harapannya dengan adanya BLT ini, masyarakat dapat tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, yang mana salah satunya adalah terkait kebutuhan pangan sehari-hari. Mengingat permasalahan mengenai masih belum optimalnya tingkat konsumsi pangan masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin di Indonesia, serta melihat salah satu tujuan BLT terhadap mitigasi daya beli masyarakat miskin di atas, penelitian ini kemudian bertujuan untuk menguji adanya perbedaan konsumsi pangan rumah tangga yang didorong oleh status penerimaan program BLT. Program BLT yang akan diestimasi pada penelitian adalah program BLT tahun 2005-2006, yang mana program ini menyasar pada 15,4 juta rumah

<sup>2</sup> Kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita di bawah Rp150.000,-/kapita/minggu dicantumkan dalam Gambar 1 sebagai proksi kelompok masyarakat miskin. Menurut BPS, Garis Kemiskinan (GK) pada September 2020 adalah sebesar Rp458.947,-/kapita/bulan dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp339.004,-. Artinya, GK per minggu adalah sekitar Rp114.737,-/kapita dan GKM per minggu adalah sekitar Rp84.751,-/kapita.

tangga penerima manfaat sebelum kemudian meningkat menjadi hingga hampir 18 juta rumah tangga (Izzati *et al.*, 2020). Penelitian ini menggunakan berbagai indikator konsumsi pangan yang berfokus pada konsumsi karbohidrat (dalam hal ini adalah beras sebagai sumber karbohidrat utama di Indonesia) serta protein (seperti daging ayam dan daging sapi)<sup>3</sup>. Pertanyaan penelitian yang kemudian akan dijawab dengan proses estimasi dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keterkaitan antara status penerimaan BLT terhadap tingkat konsumsi beras, daging ayam, serta daging sapi oleh rumah tangga. Namun perlu menjadi catatan bahwa penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada korelasi antara status penerimaan BLT dan tingkat konsumsi pangan rumah tangga pada satu poin waktu. Oleh karena itu, hasil estimasi penelitian ini kemudian tidak dapat serta-merta diterjemahkan sebagai evaluasi dampak program BLT, serta tidak dapat menggambarkan perilaku konsumsi pangan rumah tangga yang terbentuk secara multidimensi dan merupakan proses akumulasi dalam jangka panjang.

Penelitian ini disusun sebagai berikut, yaitu pertama, bagian pendahuluan ini yang mendiskusikan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian. Bagian selanjutnya kemudian akan mengulas beberapa literatur yang relevan dengan konsumsi pangan dan program BLT di Indonesia. Kemudian, bagian ketiga akan mendeskripsikan mengenai data dan metodologi penelitian yang akan digunakan oleh penelitian ini. Selanjutnya bagian keempat, yaitu bagian inti, yang akan mengelaborasi hasil estimasi beserta pembahasannya, dan selanjutnya diikuti oleh bagian terakhir, yaitu bagian penutup untuk menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian ini.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Konsumsi Pangan dan Pembangunan Ekonomi

Peranan kecukupan nutrisi pangan dan tingkat kesehatan secara umum terhadap variabel-variabel pembangunan ekonomi telah banyak didiskusikan oleh banyak literatur<sup>4</sup>. Misalnya, mengenai bagaimana kecukupan nutrisi memberikan dampak positif bagi *output* pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja secara umum (Strauss, 1986; Tjiptoherijanto, 1986; Croppenstedt dan Muller, 2000). Asupan nutrisi dan asupan protein secara spesifik juga diestimasi memiliki pengaruh terhadap tingkat upah (Thomas dan Strauss, 1997). Dalam lingkup negara, peningkatan ketersediaan asupan kalori pun memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan negara atau pertumbuhan ekonomi (Tjiptoherijanto, 1986; Fogel, 2004). Sedikit berbeda dengan penelitian Strauss (1986), Deolalikar

<sup>3</sup> Penelitian ini berfokus pada asupan nutrisi dasar berupa karbohidrat dan protein (asupan kalori secara umum), bukan pada peningkatan kualitas pangan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jumlah BLT yang disalurkan relatif tidak banyak (yaitu sebesar Rp300.000,-/triwulan atau setara dengan Rp100.000,-/bulan), dan peningkatan yang kecil pada pendapatan dinilai hanya akan meningkatkan asupan kalori, bukan pada perbaikan kualitas pangan (Millikan, 1971).

<sup>4</sup> Misalnya dari Strauss dan Thomas (1998) yang telah merangkum berbagai literatur terdahulu yang membahas nutrisi, kesehatan, dan pembangunan ekonomi, serta sekaligus meninjau berbagai metodologi pengukuran asupan nutrisi.

(1988) menemukan bahwa status nutrisi berperan penting, sementara asupan kalori tidak terbukti demikian. Dampak yang relatif kecil dari asupan nutrisi terhadap produktivitas juga ditunjukkan dalam Haddad dan Bouis (1991). Secara lebih detail, dampak status nutrisi bagi produktivitas ekonomi dan tenaga kerja pernah diestimasi dan hasilnya menunjukkan adanya disparitas antargender, yaitu bagaimana status nutrisi laki-laki berpengaruh signifikan terhadap produktivitas, sementara bagi perempuan tidak terbukti demikian (Sahn dan Alderman, 1988; Fafchamps dan Quisumbing, 1999).

Sebuah perspektif berbeda ditunjukkan oleh Cole (1971) mengenai bagaimana perbaikan nutrisi hanya akan berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Sementara untuk jangka panjang, peningkatan produktivitas hanya dapat efektif dicapai melalui perbaikan nutrisi pada masa kecil yang kemudian direfleksikan melalui tingkat kesehatan yang lebih baik di saat masa dewasa dan menjadi tenaga kerja. Hal ini pun didukung oleh UNICEF (2017) mengenai pentingnya asupan nutrisi yang baik di 1000 hari pertama kehidupan, karena anak-anak yang mengalami *stunting* dinilai akan memiliki tingkat produktivitas ekonomi yang lebih rendah dan memperoleh pendapatan 20 persen lebih rendah dibandingkan rata-ratanya ketika ia dewasa. Dalam lingkup negara, fenomena *stunting* pun dinilai mampu menurunkan PDB hingga 3 persen (UNICEF, 2017). Dari berbagai literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat konsumsi pangan dan kecukupan nutrisi berperan sangat penting bagi pembangunan ekonomi melalui transmisi perbaikan tingkat kesehatan yang mengarah pada perbaikan kinerja dan produktivitas ekonomi.

## 2.2. Program BLT di Indonesia

Menurut US Energy Information Administration (EIA), pada tahun 2004, harga minyak mentah dunia meningkat hampir dua kali lipat daripada tingkat harganya pada tahun 2003. Hal ini menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk subsidi meningkat 13 persen pada tahun 2002-2003 menjadi 29 persen pada tahun 2005. Di sisi lain, subsidi bahan bakar sendiri mendominasi hingga 75 persen dari total subsidi dan belanja transfer (World Bank, 2012). Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mereformasi subsidi bahan bakar pada tahun 2005, yang mana hal ini menyebabkan kenaikan harga bahan bakar rata-rata hingga 125 persen untuk bensin, minyak tanah, dan solar. Sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar di pasaran tersebut, pemerintah kemudian meluncurkan program BLT di akhir tahun 2005 kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan untuk menyokong tingkat konsumsi mereka di saat terjadi guncangan (dalam hal ini adalah kenaikan harga bahan bakar)<sup>5</sup>. Dianggarkan hingga Rp23.106 miliar untuk periode 2005-2006 dan mendominasi hingga 61,6 persen dari belanja pemerintah pusat untuk bantuan sosial, program ini menyalurkan bantuan pada 15,4 juta rumah tangga pada tahun 2005 dan 17,7 juta rumah tangga pada tahun 2006 dengan memberikan bantuan tunai sebesar Rp100.000/bulan yang disalurkan setiap triwulanan selama 1 tahun (artinya, total

<sup>5</sup> Selanjutnya, BLT periode 2005-2006 disebut dengan BLT-I, mengingat adanya BLT periode 2008-2009 yang kemudian disebut dengan BLT-II.

sebesar Rp1,2 juta diterima oleh rumah tangga penerima manfaat BLT). Program ini menjadi program yang dinilai paling tepat sasaran di antara program bantuan sosial lainnya pada masa itu, mengingat setidaknya hingga dua per tiga dari total rumah tangga penerima manfaat BLT datang dari kelompok 40 persen rumah tangga termiskin (World Bank, 2012)<sup>6</sup>.

Apabila dibandingkan dengan model bantuan sosial lainnya, BLT dianggap jenis bantuan sosial yang paling tepat diberikan untuk mengatasi guncangan pada konsumsi masyarakat karena relatif mudah dan cepat disalurkan, serta tidak membutuhkan proses administrasi yang lama. Selain itu, rumah tangga penerima manfaat juga diberikan kebebasan untuk melakukan penyesuaian konsumsi masing-masing dengan membelanjakan BLT-nya. Sebagai konsekuensinya, program ini tidak ditujukan sebagai strategi penanggulangan kemiskinan secara umum serta tidak mampu mengubah perilaku rumah tangga dalam jangka panjang. Hal ini berbeda dengan bantuan tunai bersyarat (*Conditional Cash Transfer/CCT*), seperti Program Keluarga Harapan/PKH atau Bantuan Operasional Sekolah/BOS yang ditujukan untuk peningkatan investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena jumlah bantuan BLT yang relatif tidak banyak untuk mampu memengaruhi perilaku rumah tangga, dan untuk nominal BLT-I sendiri kurang lebih hanya setara dengan 15 persen pengeluaran bulanan dari rumah tangga penerima manfaat pada tahun 2005 (World Bank, 2012).

### 2.3. Evaluasi Dampak Program BLT di Indonesia

Evaluasi dampak dari program BLT terhadap kondisi sosioekonomi rumah tangga secara umum sudah banyak dikaji oleh literatur-literatur terdahulu. Misalnya, studi dari World Bank (2006) yang mengestimasi bahwa apabila tidak ada program BLT, kenaikan harga bahan bakar dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan miskin hingga 5 persen. Kemudian dengan adanya BLT tersebut, secara umum masyarakat miskin memperoleh keuntungan pendapatan bersih (*net income gains*) dan rata-rata sudah terkompensasi melebihi kenaikan harga bahan bakar, bahkan pada kondisi masih adanya salah sasaran/*mistargeting*. Senada dengan salah satu estimasi World Bank tersebut, Yusuf dan Resosudarmo (2008) menemukan bahwa meskipun BLT dianggap sebagai program yang tepat dalam memitigasi dampak reformasi subsidi bahan bakar, namun program ini cenderung memberi kompensasi yang berlebih kepada masyarakat miskin pedesaan, sementara di sisi lain, masyarakat miskin perkotaan cenderung kurang terkompensasi. Perspektif dan temuan lain telah diestimasi oleh Bazzi *et al.* (2015) dimana ditemukan tidak ada perbedaan pertumbuhan pengeluaran per kapita antara rumah tangga penerima manfaat BLT dan rumah tangga non-penerima manfaat ketika bantuan disalurkan secara tepat waktu. Sebaliknya, penyaluran bantuan yang tidak tepat waktu menyebabkan penurunan

<sup>6</sup> Apabila dibandingkan dengan subsidi bahan bakar, yang mana 40 persen rumah tangga terkaya justru menerima hingga 60 persen dari manfaat subsidi tersebut dan sebaliknya, 20 persen rumah tangga termiskin hanya menerima kurang dari satu per dua puluh manfaat subsidi (World Bank, 2012). Hal ini mengindikasikan kurang tepat sasaran program subsidi bahan bakar, terutama bagi peningkatan taraf ekonomi kelompok masyarakat miskin.

pertumbuhan pengeluaran sebesar 7,5 persen, terutama bagi rumah tangga yang tinggal di wilayah dengan akses pada lembaga keuangan yang terbatas. Komplementer dengan temuan tersebut, dengan menggunakan data *the Indonesia Family Life Survey* (IFLS), Khomaini (2020) mengestimasi bahwa pemberian BLT justru cenderung berkorelasi negatif hingga tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan subjektif di tingkat rumah tangga, terutama pada parameter persepsi masa depan dan kesejahteraan anak. Kemudian, spesifik terhadap ketahanan pangan rumah tangga, penelitian dari Amrullah *et al.* (2020) yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menemukan bahwa BLT memberikan dampak positif bagi rumah tangga penerima manfaat berupa peningkatan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari. Tidak hanya itu, peningkatan tersebut juga terjadi pada pengeluaran pangan per kapita, serta terdapat pergeseran pangsa pengeluaran pangan dari kelompok makanan umbi-umbian, hewani, serta buah dan sayur menjadi padi-padian, makanan dan minuman jadi, serta rokok.

Beberapa dampak sosioekonomi lain dari pemberian BLT, misalnya bagaimana BLT mampu meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan rawat jalan dan mengurangi insiden pekerja anak (*child labor*) (Bazzi *et al.*, 2011). Namun di sisi lain, rumah tangga penerima manfaat BLT juga cenderung meningkatkan konsumsi rokok sebesar hampir 2 batang per minggu dibandingkan rumah tangga non-penerima manfaat, dan hal ini harus diwaspadai karena perilaku merokok tersebut cenderung mengesampingkan (*crowd-out*) kebutuhan nutrisi dan pendidikan dalam rumah tangga (Dartanto *et al.*, 2021). Sedikit berbeda, penelitian dari Al Izzati *et al.* (2020) justru membuktikan bahwa menerima BLT tidak mengubah perilaku rumah tangga penerima manfaat ke arah perilaku yang tidak diinginkan, misalnya terkait dengan perilaku merokok maupun berkurangnya *labor supply* rumah tangga. Sudut pandang lain juga telah ditelaah, misalnya mengenai penerimaan BLT yang dinilai mampu meningkatkan modal sosial (*social capital*) melalui peningkatan partisipasi pada aktivitas sosial seperti arisan (Rasyid *et al.*, 2015).

Dari beberapa literatur di atas, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa dampak program BLT cenderung bervariasi, bergantung pada indikator sosioekonomi yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian akan berkontribusi pada literatur yang sudah ada mengenai keterkaitan program BLT-I terhadap tingkat konsumsi pangan rumah tangga sebagai salah satu indikator sosioekonomi rumah tangga yang juga penting untuk diperhatikan.

### **3. Metodologi Penelitian**

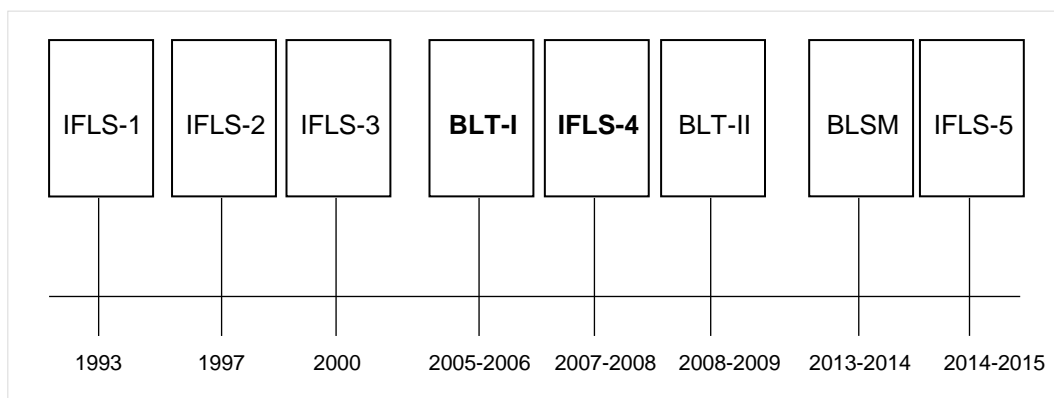
#### **3.1. Jenis Penelitian dan Data**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data *the Indonesia Family Life Survey* (IFLS) gelombang 4 (2007). IFLS adalah data survei sosioekonomi yang berkelanjutan dan merepresentasikan hingga 83 persen populasi Indonesia yang tinggal di 13 provinsi (Strauss *et al.*,

2009). Diselenggarakan oleh RAND Corporation dan SurveyMeter, survei ini mengumpulkan data sosioekonomi pada level individu, rumah tangga, beserta dengan komunitas tempat tinggalnya. Dimulai pada gelombang 1 (1993), survei ini mulai mewawancarai individu-individu pada 7.224 rumah tangga. Kemudian gelombang 2 (1997) dan gelombang 3 (2000) dilaksanakan dengan mewawancarai kembali responden gelombang sebelumnya. Gelombang 4 (2007) kemudian juga dilaksanakan dengan mewawancarai rumah tangga sampel gelombang 1 (1993) beserta dengan rumah tangga *splitoffs*-nya, yaitu sejumlah 13.535 rumah tangga dan 44.103 individu. Gelombang 5 (2014) pun telah dilaksanakan pada sampel rumah tangga yang sama beserta dengan rumah tangga *splitoffs*-nya, yaitu sejumlah 16.204 rumah tangga dan 50.148 individu (Strauss *et al.*, 2016).

IFLS gelombang 4 (IFLS-4) memiliki kuisioner yang berisi tentang program bantuan sosial, yaitu pada Buku 1 Seksi KSR (Konsumsi Resurvai), yang mana di dalamnya terdapat salah satu pertanyaan mengenai status penerimaan BLT. Berdasarkan Gambar 3, IFLS-4 memiliki data dari rumah tangga penerima manfaat BLT karena survei dilaksanakan setelah program BLT-I diluncurkan. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan data IFLS-4 sebagai sumber data. Dari 12.977 rumah tangga yang diwawancarai pada IFLS-4, tercatat lebih dari 22 persennya atau sekitar 2.901 rumah tangga merupakan rumah tangga penerima manfaat BLT-I.

**Gambar 3. Lini Masa Data IFLS dan Pencairan Program BLT di Indonesia**



Sumber: Izzati *et al.* (2020)

Sementara itu, berbagai variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 di bawah ini. Secara rata-rata, rumah tangga responden IFLS-4 mengonsumsi 1,63 kg beras/kapita/bulan, 0,11 kg daging ayam/kapita/bulan, dan 0,02 kg daging sapi/kapita/bulan. Angka rata-rata yang relatif kecil ini disebabkan oleh relatif besarnya pangsa rumah tangga yang tidak melakukan pembelian pada satu bulan terakhir, yaitu sebanyak 26,39 persen rumah tangga tidak membeli beras, sebanyak 51,98 persen rumah tangga tidak membeli daging ayam, serta sebanyak 86,08 persen rumah tangga tidak membeli daging sapi pada satu bulan terakhir. Kemudian, dari keseluruhan rumah tangga responden IFLS-4 tersebut, sebanyak 22,4 persennya merupakan rumah tangga penerima BLT-I, sebagaimana telah disinggung di paragraf sebelumnya.



Beranjak pada karakteristik sosioekonomi rumah tangga, sebanyak 96,2 persen rumah tangga responden sudah memiliki akses listrik, sebanyak 28,1 persen rumah tangga memiliki lemari pendingin/kulkas, dan 60,5 persen rumah tangga menggunakan bahan bakar memasak yang layak<sup>7</sup>. Selanjutnya, sebanyak 27,8 persen rumah tangga responden memiliki lahan pertanian dan sekitar 46 persen rumah tangga tinggal di wilayah pedesaan. Rata-rata, setiap rumah tangga responden memiliki 5 orang anggota rumah tangga dan 5,61 persen di antaranya memiliki lebih dari 10 orang anggota rumah tangga. Terkait dengan karakteristik kepala rumah tangga, sekitar 18,3 persen rumah tangga dikepalai oleh seorang perempuan dan rata-rata usia kepala rumah tangga adalah 44 tahun dengan kurang dari 1 persen kepala rumah tangga berusia 17 tahun ke bawah serta lebih dari 10 persen kepala rumah tangga berusia di atas 65 tahun. Sekitar 79 persen rumah tangga dikepalai oleh kepala rumah tangga yang berstatus menikah dan sekitar 81,1 persen kepala rumah tangga beraktivitas utama bekerja. Kemudian terkait dengan tingkat pendidikannya, 8 persen kepala rumah tangga tidak pernah bersekolah, 40,4 persen kepala rumah tangga berpendidikan terakhir SD sederajat, 15,1 persen SMP sederajat, 24,3 persen SMA sederajat, dan 11,7 persen berkuliah sederajat<sup>8</sup>. Terakhir, rata-rata total pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan adalah sebesar Rp410.395,7,- dengan sekitar 32,51 persen di antaranya memiliki pengeluaran rumah tangga per kapita per bulan kurang dari Rp175.000,-<sup>9</sup>. Dari statistik deskriptif mengenai pengeluaran rumah tangga ini, dapat ditarik kesimpulan kasar bahwa terdapat indikasi kasus *under-coverage* program BLT, atau dengan kata lain, ada rumah tangga miskin yang tidak memperoleh BLT.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian	Rata-rata	Standar Deviasi
<b>Variabel Dependen</b>		
Konsumsi beras/kapita/bulan (kg)	1,629	2,605
Konsumsi daging ayam/kapita/bulan (kg)	0,109	0,337
Konsumsi daging sapi/kapita/bulan (kg)	0,021	0,214
<b>Variabel Independen</b>		
Status penerimaan BLT (ya=1)	0,224	0,417
Akses listrik (ya=1)	0,962	0,190

<sup>7</sup> Bahan bakar memasak yang layak diprosi dengan penggunaan listrik, gas, atau minyak tanah sebagai bahan bakar memasak. Sebaliknya, penggunaan kayu bakar, arang, maupun tidak memasak dianggap sebagai bahan bakar memasak yang tidak layak.

<sup>8</sup> Sisanya berpendidikan pesantren maupun Sekolah Luar Biasa (SLB).

<sup>9</sup> Rumah tangga dengan pengeluaran per kapita kurang dari Rp175.000,-/bulan dianggap sebagai rumah tangga miskin berdasarkan GK BPS pada tahun 2007 yang sebesar Rp166.697,-/kapita/bulan (Rasyid *et al.*, 2015). Total pengeluaran rumah tangga merupakan penjumlahan dari pengeluaran makanan, pengeluaran nonmakanan, dan pengeluaran untuk pendidikan yang keseluruhannya disetarakan menjadi pengeluaran bulanan.

Kepemilikan lemari pendingin/kulkas (ya=1)	0,281	0,450
Penggunaan bahan bakar memasak yang layak (ya=1)	0,605	0,489
Kepemilikan lahan pertanian (ya=1)	0,278	0,448
Bertempat tinggal di pedesaan (ya=1)	0,460	0,498
Jumlah anggota rumah tangga (orang)	5,352	2,977
Kepala rumah tangga adalah perempuan (ya=1)	0,183	0,387
Usia kepala rumah tangga (tahun)	44,027	15,363
Kepala rumah tangga berstatus menikah (ya=1)	0,790	0,407
Kepala rumah tangga bekerja (ya=1)	0,811	0,391
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga tidak bersekolah (ya=1)	0,080	0,271
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SD sederajat (ya=1)	0,404	0,491
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SMP sederajat (ya=1)	0,151	0,358
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SMA sederajat (ya=1)	0,243	0,429
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga kuliah sederajat (ya=1)	0,117	0,321
Total pengeluaran rumah tangga/kapita/bulan (rupiah)	410.395,7	509.397,4

Sumber: IFLS-4

### 3.2. Model Penelitian

Secara umum, penelitian ini mereplikasi dan memodifikasi model awal dari Cameron dan Shah (2011) serta Rasyid *et al.* (2015), yang mana model konsumsi pangan akan diestimasi dengan model di bawah ini:

$$konsumsipangan_{iv} = \beta_0 + \beta_1 BLT_{iv} + \beta_2 X_{iv} + \beta_3 Y_{iv} + \epsilon_{iv}$$

dimana  $konsumsipangan_{iv}$  adalah variabel konsumsi pangan per kapita per bulan di rumah tangga  $i$  di komunitas  $v$ ,  $BLT_{iv}$  merupakan variabel *dummy* status penerimaan program BLT bagi rumah tangga  $i$  di komunitas  $v$ ,  $X_{iv}$  adalah vektor karakteristik rumah tangga  $i$  di komunitas  $v$ ,  $Y_{iv}$  adalah vektor *dummies* komunitas  $v$  dimana rumah tangga  $i$  tinggal, serta  $\epsilon_{iv}$  sebagai *error term*. Model di atas akan diestimasi dengan *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan asumsi tidak adanya faktor-faktor tidak terobservasi yang memengaruhi tingkat konsumsi pangan rumah tangga, atau dengan kata lain, tingkat konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi sosioekonomi rumah tangga itu sendiri.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Tabel 2 menunjukkan hasil estimasi model tingkat konsumsi beras rumah tangga yang berhubungan dengan status penerimaan BLT. Dengan unit analisis pada tingkat rumah tangga, estimasi dilaksanakan dengan menggunakan variabel dependen berupa konsumsi beras per kapita per bulan oleh rumah tangga dalam satuan kilogram (kg) yang diproksi dengan pembelian dalam satu bulan terakhir dan variabel independen *interest* berupa status apakah rumah tangga pernah menerima bantuan BLT ( $ya=1$ ) atau tidak pernah menerima ( $tidak=0$ ).

**Tabel 2. Hasil Estimasi Status Penerimaan BLT terhadap Tingkat Konsumsi Beras Rumah Tangga**

Variabel dependen: konsumsi beras/kapita/bulan		
Variabel independen	(1)	(2)
Status penerimaan BLT	0,104** (0,049)	0,118** (0,056)
Akses listrik	-0,640*** (0,126)	-0,406** (0,152)
Kepemilikan lemari pendingin/kulkas	0,322*** (0,064)	0,409*** (0,071)
Penggunaan bahan bakar memasak yang layak	0,233*** (0,052)	0,354*** (0,061)
Kepemilikan lahan pertanian	-0,149*** (0,054)	-0,323*** (0,068)
Bertempat tinggal di pedesaan	0,251*** (0,055)	-0,251* (0,140)
Jumlah anggota rumah tangga	-0,076*** (0,007)	-0,081*** (0,009)
Kepala rumah tangga adalah perempuan	0,471*** (0,087)	0,358*** (0,091)
Usia kepala rumah tangga	0,028** (0,009)	0,029** (0,010)
Usia kepala rumah tangga (kuadrat)	-0,000 (0,000)	-0,000* (0,000)
Kepala rumah tangga berstatus menikah	0,800*** (0,079)	0,617*** (0,083)
Kepala rumah tangga bekerja	-0,001 (0,062)	-0,048 (0,069)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga tidak bersekolah	-0,487 (0,341)	-0,395 (0,387)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SD sederajat	-0,600* (0,335)	-0,488 (0,382)

Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SMP sederajat	-0,469 (0,337)	-0,376 (0,384)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SMA sederajat	-0,285 (0,337)	-0,178 (0,384)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga kuliah sederajat	-0,652* (0,341)	-0,507 (0,388)
Total pengeluaran rumah tangga/kapita/bulan (log)	0,614*** (0,034)	0,580*** (0,041)
Konstanta	-6,469*** (0,579)	-3,488*** (0,544)
<i>Dummies</i> komunitas	Tidak	Ya
<i>R-squared</i>	0,087	0,280
N	12.788	12.788

Catatan: robust standard errors dalam tanda kurung. Tanda \*\*\* menunjukkan  $p < 0,01$ ; \*\*  $p < 0,05$ ; \*  $p < 0,1$ . Estimasi (1) tidak mengontrol *dummies* komunitas dan estimasi (2) mengontrol *dummies* komunitas.

Hasil estimasi di atas menunjukkan bahwa adanya perbedaan tingkat konsumsi beras yang signifikan secara statistik antara rumah tangga penerima manfaat BLT dan rumah tangga non-penerima. Tanpa mengontrol variabel *dummy* untuk komunitas tempat tinggal, rumah tangga penerima manfaat BLT diestimasi mengonsumsi beras sekitar 0,1 kg lebih banyak daripada non-penerima (estimasi 1). Hasil ini pun konsisten dengan estimasi 2 yang mengontrol *dummies* komunitas, dimana rumah tangga penerima manfaat BLT mengonsumsi beras 0,12 kg lebih banyak daripada non-penerima<sup>10</sup>. Hasil estimasi ini pun sejalan dengan temuan Amrullah *et al.* (2020) bahwa BLT mampu meningkatkan asupan kalori per kapita sebesar 50,06 kkal per hari yang mayoritas disumbang oleh peningkatan asupan kalori dari kelompok makanan padi-padian yaitu sebesar 34,86 kkal per hari.

Meskipun nominal BLT relatif tidak banyak sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya, namun penerimaan BLT ditemukan mampu meningkatkan konsumsi beras. Hasil ini dikuatkan oleh temuan Rosfadhila *et al.* (2013) bahwa rumah tangga sasaran memanfaatkan dana BLT untuk konsumsi, yang mana salah satunya adalah beras. Tidak hanya itu, menurut Amrullah *et al.* (2020), pangsa terbesar pengeluaran pangan rumah tangga penerima manfaat BLT adalah padi-padian yaitu sebesar 24,66 persen. Angka ini lebih besar daripada pangsa pengeluaran pangan padi-padian oleh rumah tangga non-penerima yang hanya 18,97 persen. Selain itu, ditemukan bahwa dari 26,39 persen rumah tangga yang tidak membeli beras dalam 1 bulan terakhir, hanya

<sup>10</sup> Mengontrol *dummies* untuk komunitas/desa tempat tinggal masing-masing rumah tangga dimaksudkan untuk mengontrol faktor dan karakteristik di level komunitas/desa yang memengaruhi tingkat konsumsi pangan rumah tangga (misalnya akses dan ketersediaan bahan pangan di level komunitas/desa).

sekitar 15,11 persennya yang datang dari rumah tangga penerima manfaat BLT. Artinya, lebih banyak rumah tangga non-penerima manfaat BLT yang tidak melakukan pembelian beras (yaitu sebesar 84,89 persen). Apabila dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga, hal ini juga dapat terjadi karena rumah tangga yang lebih sejahtera cenderung melakukan pembelian dalam jumlah besar dan menstok untuk beberapa waktu ke depan, dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang membeli dalam jumlah yang lebih sedikit, namun dalam frekuensi yang lebih sering.

Kemudian terkait dengan karakteristik sosioekonomi rumah tangga lainnya, rumah tangga yang memiliki kulkas dan menggunakan bahan bakar memasak yang layak diestimasi mengonsumsi beras lebih banyak. Hal ini dapat dijelaskan melalui kepemilikan kulkas dan penggunaan bahan bakar memasak layak yang sering kali berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Hal ini pun dijustifikasi melalui hasil estimasi untuk variabel total pengeluaran rumah tangga. Peningkatan 1 persen pada pengeluaran rumah tangga per kapita akan meningkatkan konsumsi beras per kapita sebesar 0,006 kg, atau dengan kata lain, peningkatan 10 persen pada pengeluaran rumah tangga per kapita akan meningkatkan konsumsi beras per kapita sebesar 0,06 kg. Kemudian, karakteristik kepala rumah tangga juga ditemukan memiliki pengaruh terhadap tingkat konsumsi beras rumah tangga. Rumah tangga yang dikepalai oleh seorang perempuan dan berstatus menikah ditemukan mengonsumsi beras lebih banyak. Peningkatan usia kepala rumah tangga juga berhubungan dengan peningkatan konsumsi beras, namun begitu usia kepala rumah tangga mencapai 85 tahun, peningkatan usia justru akan menurunkan konsumsi beras per kapita (kurva berbentuk *inverted-U* dengan titik puncak), yang mana hasil estimasi ini dapat dijelaskan melalui fenomena penurunan produktivitas kepala rumah tangga di usia senja<sup>11</sup>. Hasil yang cukup menarik perhatian dan perlu penelusuran lebih lanjut ditunjukkan oleh rumah tangga dengan akses listrik dan memiliki lahan pertanian yang justru mengonsumsi beras lebih sedikit, serta bagaimana status bekerja dan tingkat pendidikan dari kepala rumah tangga justru tidak memberikan perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap tingkat konsumsi beras rumah tangga.

Kemudian, Tabel 3 menunjukkan hasil estimasi model tingkat konsumsi daging ayam oleh rumah tangga yang berhubungan dengan status penerimaan BLT. Dengan unit analisis yang juga pada tingkat rumah tangga, estimasi dilaksanakan dengan menggunakan variabel dependen berupa konsumsi daging ayam per kapita per bulan rumah tangga dalam satuan kilogram (kg) yang diproksi dengan pembelian dalam satu bulan terakhir dan variabel independen *interest* berupa status apakah rumah tangga pernah menerima bantuan BLT ( $ya=1$ ) atau tidak pernah menerima ( $tidak=0$ ).

<sup>11</sup> Sekitar 0,35 persen rumah tangga memiliki kepala rumah tangga dengan usia di atas 85 tahun.

**Tabel 3. Hasil Estimasi Status Penerimaan BLT terhadap Tingkat Konsumsi Daging Ayam Rumah Tangga**

Variabel dependen: konsumsi daging ayam/kapita/bulan		
Variabel independen	(1)	(2)
Status penerimaan BLT	0,001 (0,010)	0,003 (0,009)
Akses listrik	0,005 (0,007)	0,023 (0,028)
Kepemilikan lemari pendingin/kulkas	0,032*** (0,008)	0,027*** (0,007)
Penggunaan bahan bakar memasak yang layak	0,032*** (0,006)	0,038*** (0,008)
Kepemilikan lahan pertanian	0,007 (0,008)	-0,002 (0,011)
Bertempat tinggal di pedesaan	0,017** (0,007)	0,020 (0,014)
Jumlah anggota rumah tangga	-0,003*** (0,001)	-0,003* (0,002)
Kepala rumah tangga adalah perempuan	0,031*** (0,012)	0,025* (0,015)
Usia kepala rumah tangga	0,003*** (0,001)	0,002** (0,001)
Usia kepala rumah tangga (kuadrat)	-0,000** (0,000)	-0,000 (0,000)
Kepala rumah tangga berstatus menikah	0,047*** (0,013)	0,040** (0,017)
Kepala rumah tangga bekerja	0,010 (0,009)	0,007 (0,010)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga tidak bersekolah	-0,285 (0,250)	-0,338 (0,314)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SD sederajat	-0,292 (0,251)	-0,347 (0,317)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SMP sederajat	-0,295 (0,252)	-0,354 (0,320)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SMA sederajat	-0,275 (0,253)	-0,333 (0,320)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga kuliah sederajat	-0,301 (0,254)	-0,346 (0,322)
Total pengeluaran rumah tangga/kapita/bulan (log)	0,059*** (0,005)	0,059*** (0,005)
Konstanta	-0,511**	-0,870***

	(0,226)	(0,066)
<i>Dummies</i> komunitas	Tidak	Ya
<i>R-squared</i>	0,046	0,189
N	12.717	12.717

Catatan: *robust standard errors* dalam tanda kurung. Tanda \*\*\*) menunjukkan  $p < 0,01$ ; \*\*)  $p < 0,05$ ; \*)  $p < 0,1$ . Estimasi (1) tidak mengontrol *dummies* komunitas dan estimasi (2) mengontrol *dummies* komunitas.

Hasil estimasi di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan konsumsi daging ayam yang signifikan secara statistik antara rumah tangga penerima manfaat BLT dan rumah tangga non-penerima. Hasil estimasi ini konsisten pada 2 estimasi, baik estimasi 1 tanpa mengontrol *dummies* komunitas maupun estimasi 2 yang mengontrol *dummies* komunitas. Penelitian Amrullah *et al.* (2020) pun mengestimasi bahwa BLT mampu meningkatkan asupan protein per kapita sebesar 1,61 gram/hari, namun peningkatan konsumsi protein ini lebih banyak disumbang oleh peningkatan asupan protein yang bersumber dari ikan dan boga bahari (sebesar 1,07 gram/hari) dan kacang-kacangan (sebesar 2,47 gram/hari). Sementara itu, asupan protein yang bersumber dari daging justru turun 2,52 gram/hari dan pangsa pengeluaran pangan oleh rumah tangga penerima manfaat BLT untuk daging juga turun 0,19 persen. Tidak adanya pengaruh status penerimaan BLT terhadap konsumsi daging ayam juga dapat terjadi karena harga daging ayam yang relatif lebih mahal daripada beras, serta terdapat substitusi protein yang lebih terjangkau bagi rumah tangga miskin, misalnya kacang-kacangan atau telur. Selain itu, apabila dilihat dari rata-rata konsumsi daging ayam, rumah tangga penerima manfaat BLT rata-rata memang hanya mengonsumsi sebesar 0,06 kg/kapita/bulan, sementara rumah tangga non-penerima mengonsumsi hingga 0,12 kg/kapita/bulan, atau sekitar dua kali lipatnya.

Kemudian terkait dengan karakteristik sosioekonomi rumah tangga lainnya, rumah tangga yang memiliki kulkas dan menggunakan bahan bakar memasak yang layak diestimasi mengonsumsi daging ayam lebih banyak. Hal ini dapat dilatarbelakangi bahwa dengan kepemilikan barang-barang tersebut, pengolahan daging ayam menjadi lebih mudah dan kemudian mendorong pembelian daging ayam bagi rumah tangga. Selanjutnya, rumah tangga yang dikepalai oleh seorang perempuan dan berstatus menikah juga diestimasi mengonsumsi daging ayam lebih banyak. Sedikit berbeda dengan model konsumsi beras, hubungan usia kepala rumah tangga dan konsumsi daging ayam cenderung linear (estimasi 2), artinya peningkatan usia kepala rumah tangga akan meningkatkan konsumsi daging ayam. Kemudian, variabel tingkat kesejahteraan rumah tangga yang direfleksikan dengan total pengeluaran rumah tangga secara jelas sangat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi daging ayam, dimana peningkatan total pengeluaran rumah tangga per kapita sebesar 10 persen akan meningkatkan konsumsi daging ayam per kapita sebesar 0,006 kg.

Selanjutnya, Tabel 4 menunjukkan hasil estimasi model tingkat konsumsi daging sapi oleh rumah tangga yang berhubungan dengan status penerimaan BLT. Dengan unit analisis yang juga pada tingkat rumah tangga, estimasi

dilaksanakan dengan menggunakan variabel dependen berupa konsumsi daging sapi per kapita per bulan rumah tangga dalam satuan kilogram (kg) yang diproksi dengan pembelian dalam satu bulan terakhir dan variabel independen *interest* berupa status apakah rumah tangga pernah menerima bantuan BLT ( $ya=1$ ) atau tidak pernah menerima ( $tidak=0$ ).

**Tabel 4. Hasil Estimasi Status Penerimaan BLT terhadap Tingkat Konsumsi Daging Sapi Rumah Tangga**

Variabel dependen: konsumsi daging sapi/kapita/bulan		
Variabel independen	(1)	(2)
Status penerimaan BLT	-0,003 (0,002)	-0,000 (0,002)
Akses listrik	-0,004 (0,003)	-0,006* (0,003)
Kepemilikan lemari pendingin/kulkas	0,013*** (0,003)	0,014*** (0,003)
Penggunaan bahan bakar memasak yang layak	0,001 (0,002)	-0,002 (0,006)
Kepemilikan lahan pertanian	0,005 (0,004)	0,005 (0,007)
Bertempat tinggal di pedesaan	0,005 (0,003)	-0,004 (0,006)
Jumlah anggota rumah tangga	-0,001 (0,000)	-0,000 (0,000)
Kepala rumah tangga adalah perempuan	0,005 (0,012)	0,000 (0,016)
Usia kepala rumah tangga	0,001** (0,000)	0,000 (0,000)
Usia kepala rumah tangga (kuadrat)	0,000 (0,000)	-0,000 (0,000)
Kepala rumah tangga berstatus menikah	0,004 (0,012)	0,001 (0,016)
Kepala rumah tangga bekerja	-0,003 (0,007)	-0,004 (0,008)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga tidak bersekolah	0,000 (0,005)	0,005 (0,006)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SD sederajat	0,008 (0,008)	0,012 (0,009)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SMP sederajat	0,006 (0,006)	0,008 (0,007)
Pendidikan terakhir kepala rumah tangga SMA sederajat	0,012 (0,007)	0,013** (0,006)



Pendidikan terakhir kepala rumah tangga kuliah sederajat	0,024*** (0,009)	0,025** (0,012)
Total pengeluaran rumah tangga/kapita/bulan (log)	0,019*** (0,004)	0,022*** (0,007)
Konstanta	-0,265*** (0,039)	-0,157*** (0,025)
<i>Dummies</i> komunitas	Tidak	Ya
<i>R-squared</i>	0,012	0,066
N	12.792	12.792

Catatan: *robust standard errors* dalam tanda kurung. Tanda \*\*\* menunjukkan  $p < 0,01$ ; \*\*  $p < 0,05$ ; \*  $p < 0,1$ . Estimasi (1) tidak mengontrol *dummies* komunitas dan estimasi (2) mengontrol *dummies* komunitas.

Hasil estimasi di atas juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan konsumsi daging sapi yang signifikan secara statistik antara rumah tangga penerima manfaat BLT dan rumah tangga non-penerima. Hasilnya pun konsisten antara hasil estimasi yang tidak mengontrol *dummies* komunitas (estimasi 1) maupun yang mengontrol *dummies* komunitas (estimasi 2). Estimasi ini juga dapat dijustifikasi melalui penelitian Amrullah *et al.* (2020) yang menemukan bahwa peningkatan asupan protein rumah tangga yang didorong oleh BLT yang lebih banyak disumbang oleh ikan, boga bahari, serta kacang-kacangan, dan sebaliknya, asupan daging justru turun. Selain itu, harga daging sapi yang lebih mahal daripada sumber protein lain juga dapat melatarbelakangi mengapa status penerimaan BLT tidak mampu memberikan perbedaan terhadap tingkat konsumsi daging sapi rumah tangga. Apabila dilihat dari rata-ratanya, rumah tangga penerima manfaat BLT hanya mengonsumsi daging sapi sebesar 0,006 kg/kapita/bulan, lebih rendah daripada rumah tangga non-penerima yang mengonsumsi 0,02 kg/kapita/bulan, atau lebih dari tiga kali lipatnya.

Kemudian terkait dengan karakteristik sosioekonomi rumah tangga lainnya, rumah tangga yang memiliki kulkas diestimasi mengonsumsi daging sapi lebih banyak. Hal ini juga dijustifikasi dengan kepemilikan kulkas dapat mendorong pembelian karena pengolahan daging sapi akan menjadi lebih mudah. Sedikit berbeda dengan hasil estimasi kedua model sebelumnya, tingkat pendidikan kepala rumah tangga ditemukan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi daging sapi, terutama untuk kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan tinggi. Terdapat perbedaan tingkat konsumsi daging sapi sebesar 0,01 kg/kapita/hari antara rumah tangga yang memiliki kepala rumah tangga berpendidikan terakhir SMA sederajat dengan kepala rumah tangga berpendidikan terakhir selain SMA sederajat. Tidak hanya itu, terdapat juga perbedaan tingkat konsumsi daging sapi sebesar 0,03 kg/kapita/hari antara rumah tangga yang memiliki kepala rumah tangga berpendidikan terakhir kuliah sederajat dengan kepala rumah tangga berpendidikan terakhir selain kuliah sederajat. Sama seperti hasil estimasi kedua model sebelumnya, tingkat pengeluaran rumah tangga pun berpengaruh penting bagi konsumsi daging sapi, dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga per

kapita sebesar 10 persen yang akan meningkatkan konsumsi daging sapi per kapita sebesar 0,002 kg.

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Bertujuan untuk melihat perbedaan tingkat konsumsi pangan rumah tangga yang didorong oleh status penerimaan program BLT-I pada tahun 2005-2006, hasil estimasi dalam penelitian ini menemukan bahwa status penerimaan BLT oleh rumah tangga memberikan perbedaan yang signifikan terhadap tingkat konsumsi beras/kapita/bulan. Hasil ini cukup masuk akal, mengingat beras sebagai sumber pangan utama masyarakat Indonesia dengan harga yang masih terjangkau, sehingga sejumlah nominal BLT yang relatif tidak terlalu banyak tersebut dinilai cukup untuk dibelanjakan beras. Selain itu, besarnya pangsa beras atas pengeluaran pangan rumah tangga penerima manfaat BLT juga menjadi justifikasi atas hasil estimasi ini. Di sisi lain, status penerimaan BLT tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap tingkat konsumsi daging ayam dan sapi oleh rumah tangga. Hal ini dapat dijustifikasi misalnya terkait dengan tingkat harga daging ayam dan sapi yang relatif mahal bagi rumah tangga miskin, serta adanya substitusi protein yang lebih terjangkau. Secara garis besar, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dukungan literatur yang sudah ada mengenai adanya dampak positif dari program BLT terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin dalam jangka pendek, sekaligus mengonfirmasi keterbatasan program BLT ini dalam mengubah dan memperbaiki perilaku, kesejahteraan, dan kemiskinan jangka panjang.

### 5.2. Rekomendasi Kebijakan

Mengingat keterbatasan program BLT dalam mengubah dan memperbaiki perilaku, kesejahteraan, dan kemiskinan jangka panjang, maka dalam upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang, penyaluran program pemerintah yang bersifat kondisional/CCT dinilai akan lebih tepat dan efektif. Bersamaan dengan penyaluran CCT yang intensif, evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kendala penyaluran BLT/UCT juga secara umum dinilai akan mampu memitigasi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin secara temporer dengan lebih efektif.

### 5.3. Limitasi dan Saran

Investasi pada sumber daya manusia (*human capital*) telah disadari sangat penting bagi pembangunan ekonomi secara umum, yang mana salah satu dimensi pengukurannya adalah terkait dengan kesehatan. Namun di sisi lain, pengukuran *human capital* dengan tingkat kesehatan memiliki karakteristik tersendiri apabila dibandingkan dengan dimensi pengukuran lain, misalnya bagaimana pengukuran kesehatan yang cenderung multidimensi dan pengukurannya relatif sulit karena adanya potensi *measurement error* (Strauss dan Thomas, 1998). Salah satu metode yang paling umum dalam menghimpun data asupan nutrisi adalah dengan menanyakan kepada responden makanan yang dikonsumsi selama satuan waktu

terakhir, dan metode inilah yang digunakan dalam penghimpunan data konsumsi pangan dari IFLS yang digunakan dalam penelitian ini. Namun diakui oleh Strauss dan Thomas (1998) bahwa metode ini rentan akan *recall bias* serta kekhawatiran mengenai adanya variasi dalam perilaku konsumsi pangan. Artinya, dapat dikatakan bahwa hasil estimasi yang menggunakan data asupan pangan ini juga bergantung pada metode pengumpulan datanya. Oleh karena itu, mengaplikasikan metodologi penelitian alternatif yang mampu menangani jenis *bias* seperti ini dinilai dapat meningkatkan validitas hasil estimasi. Selain itu, menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak dapat serta-merta diterjemahkan sebagai evaluasi dampak program dan juga tidak mampu menggambarkan perilaku konsumsi pangan rumah tangga jangka panjang sebagaimana telah disinggung dalam Pendahuluan, maka pemanfaatan metodologi penelitian dengan *impact evaluation* juga dinilai dapat memberikan hasil estimasi yang lebih bernilai tambah. Selain itu, penggunaan jenis data pengukuran asupan nutrisi lain (misalnya dengan konversi pembelian dan konsumsi pangan rumah tangga pada asupan nutrisi dalam satuan kalori) serta evaluasi dampak program perlindungan sosial selain BLT sebagai analisis komplementer juga dinilai dapat menjadi alternatif pengembangan penelitian selanjutnya.

#### Daftar Pustaka

- Amrullah, Eka Rastiyanto, *et al.* (2020). *Impacts of Direct Cash Transfer on Household Food Security in Indonesia*. Jurnal Agro Ekonomi Vol. 38 No. 2 pp 77-90.
- Bazzi, Samuel, Sudarno Sumarto, dan Asep Suryahadi. (2011). *Safety Nets and Safety Ropes: An Evaluation of Indonesia's Compensatory Unconditional Cash Transfer Program*. Partnership for Economic Policy.
- Bazzi, Samuel, Sudarno Sumarto, dan Asep Suryahadi. (2015). *It's all in the timing: Cash transfers and consumption smoothing in a developing country*. Journal of Economic Behavior and Organization Vol. 119 pp. 267-288.
- BPS. (2019). *Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Menurut Kelompok Pengeluaran 2017-2019*.
- BPS. (2020). *Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tanpa Kelaparan.
- BPS. (2020). *Rata-rata Harian Konsumsi Protein Per Kapita dan Konsumsi Kalori Per Kapita Tahun 1990 – 2019*. Konsumsi dan Pengeluaran.
- BPS. (2021). *Rata-rata Konsumsi Perkapita Seminggu di Daerah Perkotaan dan Pedesaan Menurut Komoditi Makanan dan Golongan Pengeluaran per Kapita Seminggu (Satuan Komoditas), 2019-2020*.
- Cameron, Lisa, dan Manisha Shah. (2011). *Mistargeting of Cash Transfers, Social Capital Destruction, and Crime in Indonesia*. Monash University.

- Cole, William E. (1971). *Investment in Nutrition as a Factor in the Economic Growth of Developing Countries*. Land Economics Vol. 47, No. 2 pp. 139-149.
- Croppenstedt, Andre, dan Christophe Muller. (2000). *The Impact of Farmers' Health and Nutritional Status on Their Productivity and Efficiency: Evidence from Ethiopia*. Economic Development and Cultural Change Vol. 48, No. 3 pp. 475-502.
- Dartanto, Teguh, et al. (2021). *Good intentions, unintended outcomes: Impact of social assistance on tobacco consumption in Indonesia*. Tobacco Induced Diseases. DOI: 10.18332/tid/132966.
- Deolalikar, Anil B. (1988). *Nutrition and Labor Productivity in Agriculture: Estimates for Rural South India*. The Review of Economics and Statistics Vol. 70, No. 3 pp. 406-413.
- Fafchamps, Marcel, dan Agnes R. Quisumbing. (1999). *Human Capital, Productivity, and Labor Allocation in Rural Pakistan*. The Journal of Human Resources Vol. 34, No. 2 pp. 369-406.
- FAO. (2004). *Incorporating Nutrition Considerations into Development Policies and Programmes*. FAO Policy Brief.
- Fogel, Robert W. (2004). *Health, Nutrition, and Economic Growth*. Economic Development and Cultural Change Vol. 52, No. 3 pp. 643-658.
- Global Hunger Index*. (2020). *Indonesia. Concern Worldwide and Welthungerhilfe*. Diakses melalui <https://www.globalhungerindex.org/indonesia.html>.
- Haddad, Lawrence, dan Howarth Bouis. (1991). *The Impact of Nutritional Status on Agricultural Productivity: Wage Evidence from the Philippines*. Oxford Bulletin of Economics and Statistics Vol. 53, Issue 1, pp 45-68.
- Izzati, Ridho Al, Daniel Suryadarma, dan Asep Suryahadi. (2020). *The Behavioral Effects of Unconditional Cash Transfers: Evidence from Indonesia*. SMERU Working Paper.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022*.
- Khomaini, A. A. (2020). *Dampak program bantuan tunai (cash transfer) terhadap kesejahteraan subjektif di Indonesia*. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(1), 1-16.
- Millikan, Max F. (1971). *Population, Food Supply, and Economic Development*. Ekistics Vol. 31 No. 185 pp 292-294.
- Rasyid, Mohtar, Elan Satriawan, dan Catur Sugiyanto. (2015). *Impact of Public Transfer on Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs): The Indonesia Household Case*. The Journal of Developing Areas. Vol. 49, No. 3, pp 205-216.

- Rosfadhila, Meuthia, *et al.* (2013). *A Rapid Appraisal of the Implementation of the 2008 Direct Cash Transfer Program and Beneficiary Assessment of the 2005 Direct Cash Transfer Program in Indonesia*. SMERU Research Institute.
- Sahn, David, dan Harold Alderman. (1988). *The effects of human capital on wages, and the determinants of labor supply in a developing country*. *Journal of Development Economics* Vol. 29, Issue 2, pp 157-183.
- Strauss, John. (1986). *Does Better Nutrition Raise Farm Productivity?*. *Journal of Political Economy* Vol. 94, No. 2, pp. 297-320.
- Strauss, John, dan Duncan Thomas. (1998). *Health, Nutrition, and Economic Development*. *Journal of Economic Literature* Vol. 36, No. 2, pp. 766-817.
- Strauss, John, Firman Witoelar, Bondan Sikoki, dan Anna Marie Wattie. (2009). *The Fourth Wave of the Indonesia Family Life Survey: Overview and Field Report*. RAND Labor and Population Working Paper No. WR-675/1-NIA/NICHD.
- Strauss, John, Firman Witoelar, dan Bondan Sikoki. (2016). *The Fifth Wave of the Indonesia Family Life Survey: Overview and Field Report*. RAND Labor and Population Working Paper No. WR-1143/1-NIA/NICHD.
- Thomas, D, dan John Strauss. (1997). *Health and wages: evidence on men and women in urban Brazil*. *Journal of econometrics* No. 77 pp 159–185.
- Tjiptoherijanto, Prijono. (1986). *Hubungan Pembangunan Kesehatan dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi*. EKI Vol. XXXIV No. 1.
- UNICEF. (2017). *First 1000 Days Brief: The Critical Window to Ensure that Children Survive and Thrive*. UNICEF South Africa.
- US Energy Information Administration. tt. *STEO Supplement: Why are oil prices so high?*. Diakses melalui <https://www.eia.gov/outlooks/steo/special/pdf/high-oil-price.pdf>.
- World Bank. (2006). *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Diakses melalui <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/8172/527910ESW0v10W1100PA0Report0English.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- World Bank. (2012). *BLT Temporary Unconditional Cash Transfer: Social Assistance Program and Public Expenditure Review 2*. World Bank Jakarta. Diakses melalui <http://hdl.handle.net/10986/26698>.
- Yusuf, Arief Anshory, dan Budy P. Resosudarmo. (2008). *Mitigating Distributional Impact of Fuel Pricing Reform: The Indonesian Experience*. *ASEAN Economic Bulletin* Vol. 25, No. 1, The Environment, Climate Change, and Natural Resources in Southeast Asia: Issues and Challenges pp. 32-47.